

## Kontekstual Pelestarian Naskah Kuno/Manuskrip Dalam Menggali Kearifan Lokal sebagai *Social Capital* Membangun Bangsa: Sebuah Tinjauan UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan

Oleh:  
Adin Bondar<sup>1</sup>

### Pendahuluan

Era baru perpustakaan Indonesia. Sebutan inilah yang tepat diberikan untuk dunia kepastakawanan Indonesia dewasa ini. Kenapa demikian? Sebuah penantian yang cukup lama hampir 50 tahun lamanya, Perpustakaan Nasional beserta pemangku kepentingan berupaya agar Undang-Undang Perpustakaan di negeri ini ada. Alhasil, pada tanggal 1 November 2007 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disahkan. Undang-Undang (UU) ini merupakan payung hukum tertinggi pengembangan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat serta pelestarian naskah kuno/manuskrip sebagai pengembangan budaya bangsa.

Menarik! Jika sejarah perkembangan kepastakawanan Indonesia diikuti, dapat dikatakan berbeda dengan negara lain. Sejarah kepastakawanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh tekad dan semangat pantang mundur dari para tokoh pejuang perpustakaan walaupun mereka dihadapkan pada stigma **'kekerdilan profesi'** atau profesi yang terpinggirkan.

Apa sesungguhnya yang menarik dengan lahirnya Undang-undang Perpustakaan tersebut? Ada banyak kalangan yang mempertanyakan seputar lahirnya UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan. Pendapat masyarakat beragam, ada yang berpendapat dengan adanya UU tentang Perpustakaan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap akselerasi pengembangan perpustakaan di Indonesia, ada juga yang berpendapat, kok perpustakaan ada undang-undangnya? Sebagian lain berpendapat optimis bahwa dengan adanya UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan akan membawa era baru perpustakaan di Indonesia.

Apapun itu, menurut pendapat penulis, keberadaan UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan akan mewarnai dunia kepastakawanan Indonesia. Melalui Undang-undang tersebut telah ada Komitmen Nasional antara pemerintah dan rakyat bahwa Perpustakaan merupakan urusan wajib yang perlu dijamin oleh pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan akses layanan perpustakaan yang merata di seluruh tanah air (Pasal 7). Lebih khusus lagi adanya jaminan pemerintah terhadap pelestarian dan pendayagunaan naskah kuno/manuskrip (pasal 10). Hal ini perlu diratifikasi mengingat konsepsi pembangunan nasional secara utuh belum berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat sehingga terjadi kegagagalan pencapaian pembangunan khususnya pembangunan ketahanan budaya dan ekonomi yang berdampak pada krisis multidimensi berkepanjangan.

---

<sup>1</sup> Perencana Muda pada Perpustakaan Nasional RI

## Dasar Pemikiran Pentingnya Pelestarian Naskah Kuno/Manuskrip

Fokus utama tulisan ini adalah telaah terhadap UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan yaitu masalah pelestarian naskah kuno/manuskrip sebagaimana termaktub dalam pasal 21, ayat (d) dan pasal 10 ayat (c). Diskursus tentang pelestarian naskah kuno/manuskrip adalah fokus yang menarik untuk didiskusikan, sebab hampir 63 tahun Indonesia merdeka pelestarian terhadap karya intelektual budaya ini hampir tidak tertangani dengan baik. Ironisnya naskah-naskah nusantara sebagian besar berada dalam kondisi rusak dan telah berpindah tangan kepada kolektor luar negeri dan dijadikan sebagai sumber kajian dan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan di luar negeri.

Menurut UU No. 43/2007 naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Mengapa pelestarian naskah kuno/manuskrip penting? Masyarakat banyak yang menganggap bahwa naskah kuno/manuskrip hanya sebuah masa lalu yang tidak memiliki nilai apa-apa, bahkan petuah/norma/nilai/kearifan nenek moyang dahulu merupakan pemikiran yang sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan untuk saat ini. Pola pikir ini yang membawa lahirnya paham kapitalis dan materialistis di masyarakat.

Melalui berbagai konsep dan teori pembangunan dapat kita lihat bahwa acap kali nilai sosial masyarakat dikesampingkan. Padahal pembangunan itu sendiri pada hakikatnya digunakan untuk sebuah kemaslahatan. Pembangunan tidak membangun konsep relasi manusia namun pencapaian pada hasil atau nilai ekonomis. Akibatnya modal sosial masyarakat menjadi rapuh dan terkikis sehingga landasan aksiologi pembangunan masyarakat terinternalisasi dengan pemikiran ekonomi modern yang menitikberatkan pada pendekatan manusia sebagai modal (*capital*) bukan sebagai relasi sosial seperti yang terdapat dalam isi naskah kuno nusantara.

Bangsa ini telah banyak kehilangan pijakan, permasalahan multidimensi tak kunjung selesai: masalah politik, ekonomi, dan sosial semakin lama semakin mengkhawatirkan. Konsep dan teori pembangunan modernisasi barat selalu menjadi landasan aksiologi dalam menata dan membangun bangsa Indonesia. Kearifan lokal yang menjadi variabel utama tengah mengalami pergeseran dan tidak lagi menjadi kekuatan sosial masyarakat. Kenyataannya, telah terjadi asimilasi budaya. Ruh budaya Indonesia tidak lagi melekat dalam perilaku individu, kelompok dan bahkan penyelenggara negara sekalipun. Nilai-nilai moral dan budaya yang diwariskan nenek moyang sebagai perilaku asli Indonesia telah berada di ambang kemusnahan. Seperti, perilaku gotong royong, tepo seliro, toleransi, sopan santun telah berubah bentuk menjadi budaya "individualistis". Secara empiris, pergeseran nilai ini tentu menjadi barometer semakin rendahnya sensitivitas sosial masyarakat, tumbuh kembangnya ego sektoral melalui demoralisasi korupsi, tawuran, seks bebas, dan sebagainya. Bahkan tidak lagi dikedepankan prinsip kebersamaan baik di lingkungan keluarga, masyarakat sampai kepada penyelenggara negara. Perwujudan perilaku inilah yang menjadi penyebab terkikisnya nilai-nilai moral sehingga terjadi korupsi, konflik sosial, kerusuhan, sikap apriori yang akhirnya mengarah pada krisis kebangsaan (disintegrasi bangsa).

Indonesia sesungguhnya telah tersohor secara luas di seluruh penjuru dunia sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya/suku. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah peradaban (*world heritage*) yang telah diratifikasi PBB sebagai lokus peradaban dan sejarah yang memiliki nilai/pesan kemanusiaan yang cukup tinggi sebagai peradaban bangsa. Peninggalan budaya tersebut dapat kita jumpai berupa prasasti, candi, artefak sampai kepada karya pustaka baik berupa naskah kuno/manuskrip yang ditulis di atas lontar, kulit kayu, daluang dan lain-lain, yang

tersebar pada setiap suku di seluruh nusantara sebagai kekayaan budaya. Karya-karya ini telah terbukti sarat dengan pesan nilai luhur kemanusiaan, di samping juga mengangkat interaksi antara hasil budidaya manusia dan lingkungan alamnya.

Dominasi perilaku atau budaya modern yang diwariskan oleh masyarakat kapitalis yang individualistis telah terinternalisasi menjadi sistem sosial yang kuat pada masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa fenomena ini terjadi? Jawabannya, pemerintah dalam perspektif kelembagaan preservasi budaya tidak bersungguh-sungguh mengembangkan nilai-nilai moral yang sudah tertanam sebagai modal sosial (*social capital*) masyarakat tempo dulu sehingga terjadi kegagalan dalam transformasi nilai budaya tersebut sebagai sebuah karakter bangsa, oleh sebab itu dalam UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional memiliki tugas pokok dan fungsi melestarikan dan mendayagunakan naskah kuno/manuskrip tersebut.

Karya-karya intelektual kuno tersebut sampai saat ini belum dapat dihimpun dan dilestarikan semuanya sebagai suatu bukti sejarah peradaban Indonesia. Ironisnya, naskah-naskah kuno/manuskrip ini bahkan telah dimiliki oleh para kolektor dalam negeri dan luar negeri. Memang belum ada data yang akurat tentang jumlah naskah kuno baik yang ditulis dalam lontar, serat, kulit kayu, daluang, dan sebagainya yang merupakan hasil karya budaya nusantara. Namun, jika kita melihat dari jumlah suku bangsa di negeri ini tentu tidak tertutup kemungkinan puluhan ribu naskah dan bahkan jutaan karya belum terkumpul sebagai sebuah karya budaya bangsa. Kenyataan yang ada dengan usia yang ke-26 saat ini, Perpustakaan Nasional RI dengan koleksi naskah kuno dan manuskrip telah terkumpul sekitar 9.820 naskah. Angka ini tentu masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan jumlah naskah kuno/manuskrip yang masih tersebar dan disimpan masyarakat.

### **Relevansi Isi Naskah Kuno/Manuskrip dalam Membangun Karakter Bangsa**

Pentingnya melestarikan dan menggali kembali naskah kuno atau manuskrip sebagai peninggalan budaya leluhur tentu kurang begitu populer di kalangan masyarakat kita, terutama pada kalangan generasi muda saat ini. Karya ini dianggap hanya sebagai barang langka yang tidak memiliki arti. Acap kali benda seperti ini dianggap hanya sebagai barang yang hanya bernilai karena faktor usia atau hanya sebatas benda peninggalan masyarakat primitif atau catatan sejarah yang tidak memiliki makna. Padahal naskah-naskah tersebut, apabila digali menyimpan pesan dan sejarah perkembangan peradaban suatu bangsa yang sangat sarat dengan pesan atau norma yang masih sangat relevan dalam membangun sistem interaksi masyarakat maupun karakter suatu masyarakat apabila dapat disebarluaskan, disosialisasikan dan kemudian ditransformasikan secara internal sebagai karakter bangsa.

Kebudayaan memang suatu dialektika antara berbagai sistem yang hadir dalam suatu masyarakat (Umar Kayam, 1995). Sebagai suatu dinamika dialektik kebudayaan tidak akan kunjung mencapai kemapanan abadi. Karena itu, budaya sebagai refleksi perilaku manusia akan bersifat dinamis bergantung pada bagaimana terjadinya transformasi pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Agar budaya masyarakat dalam konteks yang luas dapat diketahui oleh orang lain, diperlukan sebuah media untuk mengekspresikannya. Bentuk dan isi/pesan yang tertulis dalam media ini perlu dilestarikan dan diinformasikan kepada masyarakat secara luas sebagai sejarah perjalanan peradaban bangsanya sendiri. Sebagai dialektika apabila suatu budaya gagal ditransformasi dan terinternalisasi ke dalam sistem sosial masyarakat, maka hal ini akan membawa dampak perubahan sosial secara universal terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal inilah sesungguhnya yang dihadapi bangsa Indonesia di mana masyarakat yang dulunya aman, tenteram, harmonis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjadi manusia berperilaku individualis,

mencintai konflik sosial, dan curiga-mencurigai satu sama lain sehingga berakibat rendahnya sensitivitas sosial terhadap sesama.

Permasalahan bangsa Indonesia yang paling mendasar saat ini di samping masalah ekonomi, adalah masalah krisis moral/kebudayaan. Kebudayaan Indonesia sarat dengan norma-norma kehidupan yang harmonis, toleran, berkepribadian dan berbudi luhur. Norma ini semakin kehilangan makna dalam perilaku masyarakat kita. Dengan berhembusnya era reformasi dan otonomi daerah, eskalasi krisis kebangsaan semakin tinggi dan banyak tatanan yang telah dibangun oleh leluhur dan pendiri bangsa terkoyak-koyak dan sirna karena kepentingan individu dan kelompok, bukan kepentingan NKRI.

Dalam menciptakan kembali harmonisasi ini perlu revitalisasi kelembagaan budaya melalui penggalian, pelestarian dan penyebarluasan terhadap nilai-nilai budaya tersebut. Perpustakaan Nasional dalam konteks Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Presiden dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan memiliki legitimasi yang kuat terhadap penyelamatan dan pengembangan serta penyebarluasan karya budaya bangsa tersebut.

Berbicara tentang pelestarian naskah kuno bukan berarti kita kembali ke masa yang lalu, akan tetapi sejarah atau isi yang tersirat di dalamnya masih relevan untuk masa kini sebagai sebuah pesan dalam memecahkan permasalahan bangsa dan masyarakat secara umum. Jika kita mau menelaah isi atau pesan yang tertulis dalam berbagai naskah kuno maupun manuskrip hasil peninggalan sejarah tersebut, maka nyatalah bahwa terdapat banyak nilai kemanusiaan, kebangsaan dan hukum yang dapat mengingatkan dan mencerahkan bangsa saat ini. Nilai yang terkandung dalam naskah kuno ini yang harus kita lestarikan dan digali kembali sebagai sebuah karakter bangsa yang di dalamnya sarat dengan harmonisasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya dan manusia dengan alam sekitarnya. Berdasarkan tinjauan literatur singkat terhadap naskah kuno dan manuskrip sebagai koleksi Perpustakaan Nasional, penulis akan menguraikan beberapa naskah kuno yang isi/pesan di dalamnya sangat relevan dalam permasalahan bangsa; baik aspek krisis kepemimpinan, disintegrasi bangsa, maupun masalah sosial saat ini:

- **Serat Poestakaradja**, naskah kuno ini sarat dengan nasihat yang menceriterakan Prabu Dipayana kepada Prabu Udayana yang berisikan lima sifat kepemimpinan/raja agung, yaitu: **Mulalat** (waspada) artinya seorang pimpinan/raja harus memperhatikan keinginan dan sifat-sifat rakyat banyak; **Malat** (pemurah) artinya seorang raja/pemimpin sebaiknya senang memberikan penghargaan atau hadiah dan menaikkan pangkat bagi prajurit/pegawai yang berprestasi; **Milut** (pematik) artinya seorang pimpinan/raja harus dekat dengan rakyat dengan kata lain seorang raja/pimpinan harus dapat menghibur dan menyenangkan hati rakyat/bawahannya. **Malidarma** (pemaaf) artinya seorang raja/pemimpin harus mau memberi maaf agar kerajaan menjadi kuat; **Palimarma** (pembimbing) artinya raja/pemimpin harus dapat membimbing ke arah perbuatan baik, dan memberikan teladan agar rakyat tahu akan kewajibannya sebagai rakyat.
- **Negarakartagama**, koleksi lontar abad 17-18, mengisahkan perjalanan Prabu Hayam Wuruk ke daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Wilayah kerajaan Majapahit diceritakan dalam pupuh 13 dan 14 meliputi wilayah barat yang terdiri dari Jambi, Palembang, Teba, Darmesraya, Kandis, Kahwas, Managkabaw, Siyak, Reham, Kampar, Pane, Mandailing, Parlak, Lampung, Barus,dll; serta wilayah tengah dan wilayah timur lainnya. Naskah ini sangat

relevan dalam mengembalikan wawasan kebangsaan yang belakangan ini mulai muncul disintegrasikan bangsa atau ingin pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Suryaraja.** Koleksi lontar abad 18 ditulis Kraton Yogyakarta berisi tentang ajaran perilaku manusia atau dasar pembentukan watak manusia yang berbudi luhur dan berkepribadian, sehingga dapat memperkuat ketahanan sosial dalam pembangunan jatidiri bangsa.

Selain itu, masih banyak naskah atau manuskrip hasil karya anak bangsa zaman dulu yang menggambarkan kehidupan sosial, interaksi dan perilaku masyarakat setempat. Keragaman suku di Nusantara menghasilkan beragam pengetahuan, petuah, puisi, dan balada yang ditransformasikan dalam bentuk lontar, kulit kayu, daluang, dll., yang mengandung makna pembentukan kepribadian, karakter bangsa dan semangat persatuan bangsa. Hal ini dapat tercermin dalam naskah kuno, seperti naskah *Hikayat Hang Tuah* dari Melayu, naskah *Cerita Parahyangan* dari Sunda, naskah *Laklak* dari tanah Batak, *Babad Tanah Jawi* dari Jawa, naskah *La Galigo* dari Makasar, *Serat Centini*, *Sutasoma*, *Undang-Undang Minangkabau*, *Risalah Hukum Kanun*, *Undang-undang Kedah* (kerajaan Malaka), dan masih banyak lagi.

Tidak berlebihan apabila naskah kuno ini ditelaah, dan ditransformasi kembali, maka akan mampu memberikan pencerahan yang positif bagi permasalahan bangsa. Menurut pendapat penulis, permasalahan bangsa yang menghadapi krisis multidimensi termasuk di dalamnya krisis moral dan kepemimpinan berawal dari gagalnya bangsa ini dalam membentuk generasi muda dengan menanamkan nilai kemanusiaan, moral maupun agama yang mengakibatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat dewasa ini semakin rapuh dan rawan.

### **Mewujudkan Pelestarian “*Mainstreaming Program*” Perpustakaan Nasional**

Konsepsi pelestarian (*preservation*) menurut Dureau dan Clement adalah mencakup unsur pengelolaan dan keuangan, termasuk cara penyampaian dan alat bantuannya, taraf tenaga kerja yang diperlukan, kebijaksanaan, teknik dan metode yang diterapkan untuk bahan pustaka serta informasi yang dikandungnya. Hal ini berarti bahwa pelestarian menyangkut usaha yang bersifat preventif dan kuratif. Dari definisi di atas, jelas bahwa upaya pelestarian yang dimaksud adalah juga berarti upaya pelestarian isi atau informasi yang dapat mengangkat nuansa roh dari pesan yang ditulis dalam naskah tersebut. Jadi, konteks pelestarian dapat dikembangkan menjadi tiga pendekatan, yaitu *pertama*, **pelestarian fisik** yaitu upaya penyimpanan, perlindungan terhadap kerusakan naskah kuno/manuskrip melalui kegiatan penjilidan, dokumentasi, fumigasi dan enkapsulasi, digitalisasi, dll; *kedua* pelestarian isi yaitu melalui alih aksara dan bahasa, penelitian serta interpretasi tentang makna yang tertulis dalam naskah; *ketiga* **pengungkapan isi** yaitu internalisasi ruh yang terdapat dalam naskah kuno yang disebut dengan “kearifan lokal” yang perlu dijadikan landasan karakter dan emosional masyarakat menjadi karakter bangsa Indonesia.

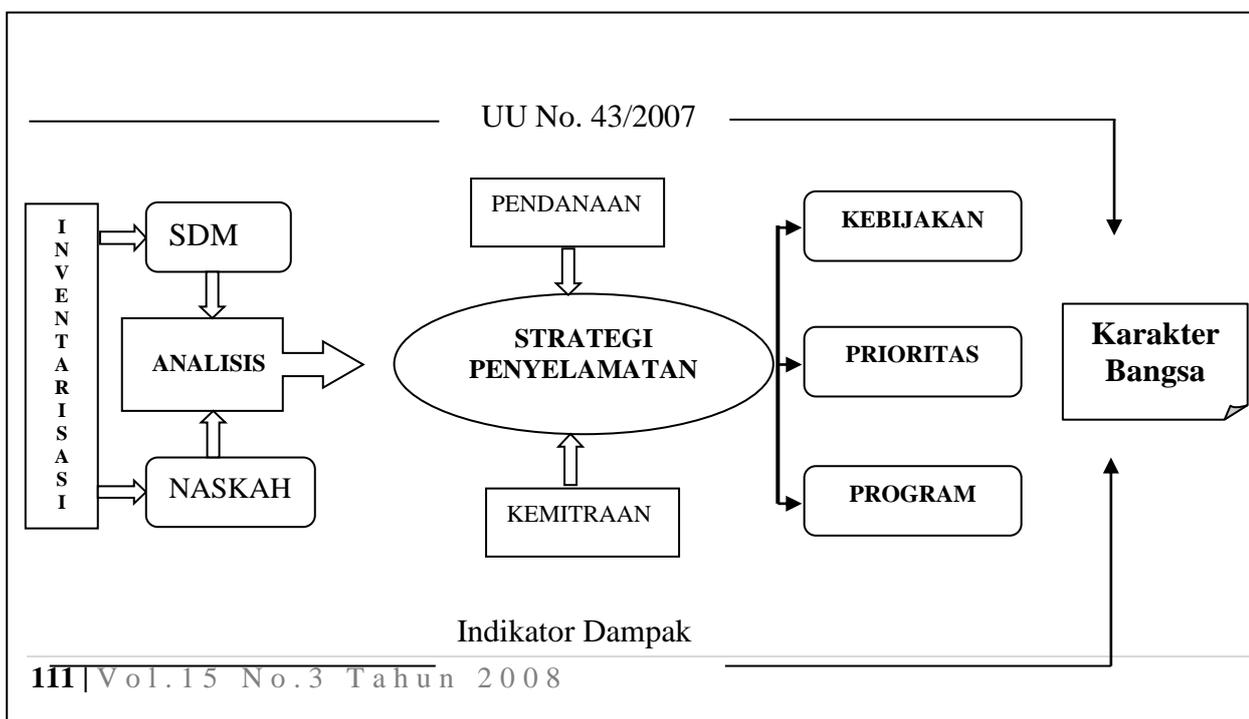
Berdasarkan UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melestarikan dan mendayagunakan naskah kuno/manuskrip baik yang ada di dalam dan luar negeri. Amanat ini perlu *grand strategy* yang holistik dan terpadu agar rencana aksi pelestarian dan pendayagunaan koleksi naskah kuno/manuskrip dapat tertangani dengan optimal. Amanat ini juga diperkuat dengan International Federation of Library Associations (IFLA) yang menyatakan bahwa setiap perpustakaan nasional berkewajiban melestarikan bentuk asli koleksi tercetak dan terekam yang diterbitkan di negara masing-masing (Gibb, 1988:216).

Sebagai amanat undang-undang, pelestarian naskah kuno dan manuskrip harus menjadi Pengarusutamaan Program atau “*mainstreaming program*” Perpustakaan Nasional. Untuk menjadikan program pelestarian sebagai program prioritas atau primadona tentu diperlukan langkah-langkah konkret, sebagai berikut:

*Pertama*, program pelestarian naskah nusantara menjadi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program pelestarian naskah kuno/manuskrip mengusulkan untuk menjadi program prioritas dalam RPJMN tahun 2009-2014 yang memuat indikator dan target pencapaian pelestarian naskah kuno dalam kurun waktu jangka menengah. Pencapaian ini dituangkan melalui rencana tindak berupa; inventarisasi, pemetaan (*road mapping*) naskah kuno nusantara, pengumpulan, alih media dan alih aksara, dan pemberian beasiswa kepada ahli naskah kuno, penghargaan bagi masyarakat serta tahap diseminasi dan sosialisasi.

*Kedua*, mereposisi alokasi anggaran program preservasi dan sumber lain. Konsep ini memerlukan dukungan seluruh jajaran Perpustakaan Nasional. Hal ini sulit dilakukan karena masih banyaknya kepentingan sektoral berbagai unit kerja lainnya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengupayakan adanya kebijakan Kepala Perpustakaan Nasional yang dapat mereformasi anggaran program preservasi yang selama ini rata-rata hanya 1% dari keseluruhan anggaran Perpustakaan Nasional. Peningkatan anggaran program preservasi naskah kuno/manuskrip ini dilakukan secara berkesinambungan sampai adanya pencapaian kinerja yang maksimal dalam preservasi terhadap khazanah budaya bangsa melalui kegiatan penerjemahan dan pengalih aksaraan naskah kuno/manuskrip yang kemudian dialihbentuk ke dalam buku, CD-ROM, mikrofilm, kaset, slide, dll; serta disebarluaskan ke masyarakat di seluruh tanah air. Untuk pendanaan program pelestarian ini, Perpustakaan Nasional perlu mencari terobosan baru, tidak hanya mengandalkan pendanaan melalui APBN tetapi juga mencari sumber lain melalui sistem *cost sharing* dengan berbagai instansi, lembaga swasta, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di samping sponsor lain yang peduli (*concern*) terhadap pelestarian naskah kuno di dalam dan luar negeri.

**Matriks: Kerangka Konseptual Pelestarian Naskah Kuno/Manuskrip**



**Ketiga, membangun pusat pengembangan dan pengkajian pelestarian naskah nusantara.** Perpustakaan Nasional perlu melakukan reorganisasi dengan mengembangkan struktur organisasi melalui pusat pengembangan dan pengkajian naskah kuno/manuskrip nusantara. Pusat ini akan merupakan badan baru di lingkungan Perpustakaan Nasional yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkaji dan menelaah seluruh isi naskah kuno nusantara dengan melibatkan para ahli pernaskahan kuno seluruh tanah air. Melalui pusat ini Perpustakaan Nasional akan mampu menjadi lembaga sentral pelestarian bahan pustaka dan dapat memberikan keragaman karya budaya intelektual masyarakat yang bersumber dari daerah serta berfungsi sebagai perekat NKRI. Hal ini diperlukan mengingat adanya perubahan sistem pemerintahan Indonesia ke sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan perubahan ini, sebagian besar tugas dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan telah diberikan kepada pemerintah daerah. Pengaruhnya sangat terasa sebab secara organisatoris Perpustakaan Nasional tidak lagi memiliki instansi vertikal di daerah dan kewenangan pelestarian bahan perpustakaan di daerah ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Pengalaman menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pelestarian di daerah sangat tidak memadai. Karena itu, Perpustakaan Nasional dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan sarana dan prasarana preservasi mutakhir yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan pelaksanaan kegiatan preservasi di samping menyusun kebijakan pelestarian antara pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

**Keempat, diversifikasi alih bentuk pelestarian dan alih aksara.** Dalam upaya memacu program pelestarian karya budaya tersebut, Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang mengemban akuntabilitas terhadap pengembangan dan pelestarian naskah kuno nusantara maupun karya intelektual lainnya perlu melakukan revitalisasi dan diversifikasi terhadap pengemasan atau pengalihbentukan naskah-naskah tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan transkripsi dan transliterasi seluruh karya nusantara ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris dalam kemasan yang menarik. Kemasan tersebut harus lebih ramah dan murah; baik dalam bentuk buku, artikel, CD-ROM, *e-book*, maupun bentuk lainnya. Seluruh naskah nusantara dan hak publikasi dimiliki oleh pemerintah yang kemudian bisa mencetak dan menyebarkan kepada masyarakat. Bahkan ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di sekolah-sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga pendidikan secara luas.

**Kelima, kemitraan dengan penegak hukum, tokoh agama/adat serta kerjasama dengan perguruan tinggi.** Rendahnya kesadaran masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pengidentifikasian atau penyerahan naskah kuno sebagai peninggalan bersejarah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama kemitraan dengan melibatkan tokoh masyarakat/agama serta lembaga penegak hukum terhadap mereka yang tidak bersedia menyerahkan naskah tersebut kepada pemerintah. Selain itu, sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa naskah kuno yang ada di masyarakat memiliki nilai sakral sebagai warisan nenek moyang mereka sehingga ditafsirkan memiliki kesakralan. Upaya yang dapat dilakukan adalah secara persuasif dengan melibatkan penegak hukum dan tokoh agama/masyarakat. Sedangkan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai ahli dalam alih aksara, dapat diatasi Perpustakaan Nasional dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan/program studi bahasa daerah serta memberikan beasiswa serta jaminan pekerjaan terhadap mahasiswa yang tertarik dalam bidang bahasa daerah di perguruan tinggi.

## Penutup

Pelestarian naskah kuno/manuskrip sebagaimana diamanatkan UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan merupakan fokus pembangunan yang perlu dijadikan *mainstreaming program* Perpustakaan Nasional dalam kurun waktu 2009-2014. Naskah kuno/manuskrip mempunyai hubungan dalam membangun karakter bangsa (*national and character building*). Kata kunci yang perlu dikedepankan adalah ruh atau nilai/norma yang terdapat dalam isi naskah kuno tersebut perlu segera diinventarisasi, digali, ditelaah dan disosialisasikan kepada masyarakat, mengingat semakin meningkatnya masalah-masalah sosial di Indonesia yang diakibatkan oleh asimilasi karakter budaya kapitalis dan materialistis yang semakin kuat di masyarakat maupun penyelenggara negara.

Jawaban atas kompleksitas permasalahan bangsa saat ini boleh jadi dengan melakukan *reorientasi* terhadap karakter bangsa melalui kearifan lokal masing-masing suku, sebagaimana telah terbangun sejak bangsa ini ada sebagai modal sosial seperti karakter gotong royong, tepo seliro, toleransi, pemimpin yang merakyat, dll., yang berorientasi pada peningkatan hubungan antara manusia dan manusia serta antara manusia dengan Tuhannya.

## Daftar Pustaka

- Dureau, J.M. dan Clement, DWG. 1990. *Dasar-dasar pelestarian dan pengawetan bahan pustaka*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Gardjito. 2003. *Program kegiatan pusat preservasi bahan pustaka tahun 2003*. Cisarua: Rapat Kerja Perpustakaan Nasional RI Tahun 2003.
- Universitas Diponegoro. 1995. *Setengah abad budaya Indonesia: dalam rangka Lustrum VI Fakultas Sastra UNDIP dan 50 Tahun Indonesia Merdeka*. Semarang: Fakultas Sastra.